

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR**

**(Studi Kasus di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak,**

**Kabupaten Bantul Tahun 2015)**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun Oleh :

**SULUH MILANTI**

**20130520061**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## Sinopsis

Pembangunan merupakan tolok ukur sebuah Negara dalam kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang baik maka memiliki warga Negara yang sejahtera, begitupun sebaliknya. Pembangunan di sebuah Negara diawali dengan pembangunan pada titik terendah, yaitu tingkat Desa, sehingga peran Pemerintah Desa dalam membangun pembangunan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Seperti pada Desa Gilangharjo yang menerima alokasi dana Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa, pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo memerlukan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, maka pembangunannya dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan pada wilayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah Aparatur Pemerintah Desa Gilangharjo, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Dukuh wilayah Desa Gilangharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan metode observasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari sebuah pembangunan. Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat menentukan keberlangsungan dan kualitas sebuah pembangunan infrastruktur. Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ditujukan melalui pembangunan secara terpadu, yaitu secara gotong-royong, dimana masyarakat membaur menjadi satu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo menitikberatkan kepada kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga pembangunan yang terlaksana sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo sebagai pemerataan pembangunan sesuai dengan fungsi Alokasi Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo yang telah terlaksana pada tahun 2015 mendapatkan perawatan dari Pemerintah Desa, agar infastruktur tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur lebih diminimalisir.

Kata Kunci: Pembangunan, Pembangunan Desa

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa adalah suatu Pemerintah terkecil yang ada di Indonesia dan sebagai pijakan pertama atau tolok ukur pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Ketika kesejahteraan Negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, suprastruktur dan hal lainnya baik, maka hal tersebut dirasakan juga oleh Pemerintah di atasnya. Namun ketika kesejahteraan di Desa tidak baik dan bahkan menurun, maka pemerintah di atasnya dapat dikatakan gagal dalam memberikan otonominya.

Pembangunan di Desa merupakan pembangunan awal untuk mensukseskan pembangunan di Daerah, sehingga membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang matang. Penyelenggara pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di pedesaan adalah pemerintah Desa sendiri, dimana Pemerintah Desa membuat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang sebelumnya di musyawarahkan bersama pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa. RPJMDes digunakan sebagai awal mula perencanaan pembangunan di Desa karena pembangunan yang baik pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik pula. Pembangunan yang dilakukan oleh Desa tentunya tidak lepas dari penggunaan keuangan Desa. Keuangan Desa yang selanjutnya disebut sebagai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan bersumber dari Anggaran Belanja dan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015, dimana didalam pasal 3 disebutkan bahwa rincian anggaran belanja Negara meliputi rincian anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa. Besarnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Kabupaten atau Kota telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015 pada lampiran XXII. Sehingga alokasi dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dapat dengan mudah diakses ketika sudah ada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Desa Gilangharjo yang berada di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul merupakan salah satu Desa yang ada di Indonesia yang melakukan otonomi Desa, serta terdiri dari 15 Pedukuhan dan terbagi atas dua wilayah, wilayah utara dan wilayah selatan yang dipisahkan oleh jalan lintas Kabupaten, yaitu jalan Srandakan. Pembangunan yang dilakukan di Desa Gilangharjo terbagi atas dua aspek, yaitu pembangunan fisik atau infrastruktur dan pembangunan produktivitas atau pemberdayaan masyarakat Desa Gilangharjo.

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pendanaan pembangunan, dimana pendanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo menggunakan Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Desa Gilangharjo memaksimalkan penggunaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, sehingga Pemerintah Desa Gilangharjo mengharapkan dengan adanya dana Desa, masyarakat dapat lebih partisipatif dan terlibat aktif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa.

Alokasi dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gilangharjo pada tahun anggaran 2015 menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1,685,203,000,-. Dana Desa tersebut tentunya tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Gilangharjo, melainkan secara bertahap (3 tahap). Tahap pertama sebesar 40% yaitu Rp.674,081,200,-, tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp.674,081,200,-, dan tahap ketiga sebesar 20% yaitu Rp.337,040,600,-. Terlepas dari banyaknya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat Desa menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Gilangharjo, dimana seharusnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan mempunyai sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Gilangharjo masih kurang berpartisipasi dan masih kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kelas ekonomi yang ada di tingkat masyarakat Desa Gilangharjo.

Masyarakat Desa Gilangharjo terbagi atas tingkatan kelas ekonomi yang berbeda, seperti masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas, masyarakat kelas menengah dan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Perbedaan kelas ekonomi ini dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat Desa Gilangharjo, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas dan kelas menengah didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru, POLRI, TNI, wirausaha serta wiraswasta. Sedangkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah atau kelas menengah untuk wilayah selatan jalan merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah kebawah didominasi oleh masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang di pasar, mengingat Desa Gilangharjo mempunyai sebuah pasar Desa. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas tentunya lebih kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pedukuhan seperti pertemuan rutin tingkat Pedukuhan atau RT dan gotong-royong. Hal ini dibuktikan ketika ada gotong-royong pembangunan infrastruktur ditingkat Pedukuhan, masyarakat tersebut lebih memanfaatkan jasa buruh bangunan daripada harus bekerja menangani pembangunan. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah kebawah, jiwa dan semangat gotong-royong

mereka masih sangat tinggi, hal ini juga dibuktikan ketika ada kegiatan gotongroyong pembangunan, mereka menangani sendiri pembangunan tersebut, tentunya dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Pembangunan dapat berhasil dan tercapai dengan baik ketika masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa tersebut, dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Wilayah Desa Gilangharjo yang masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, berpengaruh kepada pembangunan yang dilaksanakan, dimana didalam pembangunan infrastruktur masyarakat tidak berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

#### **B. Rumusan Masalah**

- Bagaimanakah pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?
- Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dan ntuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015.

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Desa**

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak atau berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Ndraha (1991:3) Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan. Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati oleh beberapa kelompok masyarakat.

#### **B. Pembangunan Desa**

##### **1. Pembangunan**

Siagian dalam Safi'I (2009:8) menyatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Henry (2013:614) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu "proses", proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun

perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas.

## 2. Pembangunan Desa

Nyoman (1991:48) menyatakan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan Desa berintikan pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban. Nyoman (1991:53-54) menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan Desa, yaitu:

- a. Pembangunan Desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.
- b. Pembangunan Desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- c. Sasaran utama pembangunan Desa, antara lain mempercepat pertumbuhan Desa menjadi Desa swasembada, pembangunan ekonomi Desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.

## 3. Pembangunan Infrastruktur

Monica (2013:490) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara.

## C. Dana Desa

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi kegiatan

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

#### **D. Evaluasi**

Wirawan (2012:30) menyatakan bahwa evaluasi merupakan ilmu alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi. Wirawan (2012:16) membagi jenis evaluasi menjadi 3, yaitu:

##### 1. Evaluasi Menurut Objeknya

###### a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.

###### b. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

###### c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek adalah cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.

###### d. Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Didalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk materialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.

###### e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia adalah evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

##### 2. Evaluasi Menurut Fokusnya

###### a. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (*need assessment*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Menurut Wirawan (2012:20) ada enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan, yaitu:

- 1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada.
- 2) Pendekatan survei.
- 3) Forum masyarakat.
- 4) Wawancara kelompok fokus (*focus group*).
- 5) Pendekatan informan kunci (*key informan*).
- 6) Analisis isi (*content analysis*).

###### b. Evaluasi Proses Pembangunan

Evaluasi proses adalah evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai

dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

c. Evaluasi Keluaran Pembangunan

Evaluasi keluaran yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:

- 1) Hasil atau keluaran program.
- 2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani.
- 3) Pengaruh atau akibat dari program.
- 4) Identifikasi keberlangsungan program.

3. Evaluasi Menurut Tujuannya

Evaluasi menurut tujuannya atau tujuan dari melaksanakan evaluasi adalah: mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menemukan program pembangunan yang jalan atau tidak, pengembangan staf program pembangunan, memenuhi ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memberikan uraian mengenai suatu gejala yang diteliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan dilakukan pada tingkat Pedukuhan, yaitu: Pedukuhan Kadisoro, Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Daleman serta Pedukuhan Kadekrowo yang berada di wilayah Desa Gilangharjo.

### **C. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, jadi untuk membacanya harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

##### **b. Observasi**

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembangunan Desa Gilangharjo**

##### **1. Pembangunan Desa Secara Terpadu**

Pembangunan Desa yang memfokuskan pembangunan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat didalam pembangunan, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dituturkan oleh Siswantara selaku Kepala Urusan Program Pembangunan Desa Gilangharjo. Hal ini dilakukan karena pembangunan Desa Gilangharjo dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong sesuai dengan visi Desa Gilangharjo yang dengan semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif. Pembangunan secara gotong-royong adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok rukuh tetangga (RT) atau kelompok Padukuhan yang ada di Desa Gilangharjo. Mengingat alokasi dana Desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan, maka semangat kegotong-royongan selalu ditunjukkan oleh masyarakat Desa Gilangharjo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Gilangharjo adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo secara bersamaan dan dilakukan secara serentak di sebuah rukun tetangga maupun Pedukuhan. Pembangunan infrastruktur secara serentak bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan waktu yang sama, sehingga Pemerintah Desa Gilangharjo dapat dengan mudah melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya. Pembangunan secara serentak dilakukan agar tidak terjadi penutupan akses fasilitas publik yang

mengganggu kegiatan dari masyarakat Desa Gilangharjo, selain itu tujuan dari pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong untuk pengefektifan dan pengefisiensi biaya, mengingat pembangunan Desa Gilangharjo terbagi atas berbagai macam di titik pembangunan yang berbeda setiap wilayahnya, baik itu wilayah Rukun Tetangga ataupun wilayah Pedukuhan. Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Gilangharjo dalam membagi dana Desa, sehingga menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gotong-royong. Adapun jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo pada tahun 2015 adalah:

**Tabel 3.1**  
**Jenis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa**  
**Gilangharjo Tahun 2015**

No	Kegiatan	Lokasi
1	Drainase Jalan Tertutup (Batu Putih)	Kadisoro RT 03
2	Pembangunan Gapura	Jodog RT 04/05
3	Drainase Jalan (Bata Merah)	Jodog RT 03, 04
4	Cor Blok Jalan Lingkungan	Karangasem RT 03
5	Cor Blok Jalan	Karangasem RT 05
6	Pembangunan Balai Dusun	Karangasem RT 04
7	Bangket Jalan	Daleman RT 06
8	Cor Blok Jalan	Daleman RT 04
9	Drainase Jalan (Bata Merah)	Jomboran RT 02, 04, 06
10	Bangket Jalan	Kauman RT 01, 02, 04
11	Cor Blok Jalan	Kadekrowo RT 04
12	Rehabilitasi Drainase Imbangan Jalan Aspal	Bongsren RT 03
13	Cor Blok Halaman PAUD	Bongsren RT 01
14	Pembangunan Gedung Pertemuan	Bongsren RT 01
15	Bangket Jalan	Ngaran RT 01
16	Cor Blok	Ngaran RT 01, 02, 03
17	Bangket Jalan	Karanggede RT 01
18	Bangket Jalan	Gunting RT 02
19	Cor Blok Jalan	Depok RT 02, 03
20	Pembangunan Gapura	Tegalurung
21	Bangket Jalan Kulon Carikan	Tegalurung
22	Bangket Jalan	Tegalurung RT 06
23	Cor Blok Jalan	Banjarwaru RT 04, 05
24	Drainase Jalan (Batu Putih)	Krekah RT 06, 07
25	Bangket Jalan	Krekah RT 06
26	Drainase Lingkungan Kantor Desa	Kantor Pemerintah Desa
27	Bangket Saluran Irigasi Kwarter	Sawah
28	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Krekah, Kauman, Gunting, Kadekrowo
29	Rehabilitasi Lantai Kantor Desa	Kantor Pemerintah Desa

30	Rehabilitasi Kantor Lembaga Desa	Komplek Kantor Pemerintah Desa
31	Pembersihan Jaringan Tersier (Angkat Walet)	Kantor Pemerintah Desa
32	Tempat Sepeda	Kantor Pemerintah Desa

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Gilangharjo tahun 2015

## 2. Pembangunan Sebagai Suatu Proses, Metode, Program Dan Sebagai Gerakan. (Kemampuan Masyarakat untuk Membangun Dirinya Sendiri Dengan Kemampuan Dan Sumber Daya Yang Dimiliki)

Pembangunan sebagai metode adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat Desa Gilangharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur meletakkan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan Desa. Kemampuan masyarakat Desa Gilangharjo diawali dengan penyusunan kebutuhan pembangunan yang diperlukan, dan dilanjutkan dengan pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa. Kemampuan masyarakat dalam menyusun kebutuhan pembangunan atau rencana pembangunan dilakukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan digunakan dalam sebuah pembangunan tersebut, sehingga dalam hal perencanaan ini membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tentunya tidak lepas dari peran masyarakat Desa, dimana masyarakat adalah pelaksana utama dari sebuah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Gilangharjo mendasarkan pembangunan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pekerja utama dari sebuah pembangunan adalah masyarakat Desa itu sendiri.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Pelaksana Pembangunan Desa Gilangharjo per Pedukuhan Tahun 2015**

No	Padukuhan	Laki-laki	Jenis Pembangunan
1	Pedukuhan Kauman	499	1. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2	Pedukuhan Kadekrowo	609	1. Cor Blok Jalan 2. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
3	Pedukuhan Karanggede	404	1. Bangket Jalan
4	Pedukuhan Depok	324	1. Cor Blok Jalan
5	Pedukuhan Tegalurung	494	1. Pembangunan Gapura 2. Bangket Jalan
6	Pedukuhan Banjarwaru	315	1. Cor Blok Jalan
7	Pedukuhan Krekah	619	1. Drainase Jalan (Batu Putih)

			2. Bangket Jalan 3. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
8	Pedukuhan Gunting	429	1. Bangket Jalan 2. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
9	Pedukuhan Ngaran	388	1. Bangket Jalan 2. Cor Blok
10	Pedukuhan Bongsren	565	1. Rehabilitasi Drainase 2. Cor Blok Halaman PAUD 3. Gedung Pertemuan
11	Pedukuhan Daleman	843	1. Bangket Jalan 2. Cor Blok Jalan
12	Pedukuhan Kadisoro	856	1. Drainase Jalan Tertutup (Batu Putih)
13	Pedukuhan Jomboran	598	1. Drainase Jalan
14	Pedukuhan Jodog	806	1. Pembangunan Gapura 2. Drainase Jalan (Bata Merah)
15	Pedukuhan Karangasem	591	1. Cor Blok Jalan Lingkungan 2. Cor Blok Jalan 3. Pembangunan Balai Dusun

*Sumber: Profil Desa dan Monografi Desa Gilangharjo Semester I, Bulan Januari Tahun 2015*

Pembangunan infrastruktur atas dasar kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat tersebut. Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat merupakan kinerja masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Kinerja masyarakat dalam melakukan pembangunan secara gotong-royong sangat memperhatikan kemampuan dan sumber daya manusia dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

### **3. Sasaran Pembangunan Desa Gilangharjo Tahun 2015**

Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo bertujuan sebagai pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat Desa, karena kemajuan pembangunan di tingkat Desa adalah sebuah tolok ukur kemajuan Negara. Masyarakat dengan tingkat pembangunan Desa yang tinggi merupakan masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang mempunyai orientasi kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan infrastruktur yang baik untuk meratakan pembangunannya. Hal ini adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di Desa Gilangharjo juga terlihat pada perbatasan wilayah Desa Gilangharjo yang berbatasan langsung dengan Desa Wijirejo, dengan hal ini maka pemerintah Desa Gilangharjo mampu

meratakan pembangunan infrastruktur di wilayahnya dengan menggunakan Dana Desa yang diterima dari APBN melalui transfer APBD. Sehingga pembangunan yang ada dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa Wijirejo bahwa pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo dilakukan secara merata hingga ke wilayah perbatasan Desa.

Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo pada tahun 2015 dilaksanakan secara 3 tahap, yaitu pada bulan Agustus, November dan Desember. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara 3 tahap karena penyesuaian penerimaan dari alokasi dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gilangharjo, mengingat alokasi dana Desa dibagi menjadi 3 tahap. Dana yang diterima pada setiap pembangunan dititik atau lokasi pembangunan berbeda-beda, sesuai dengan besaran dan volume pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap titik pembangunannya. Selain itu, pembangunan pada Desa Gilangharjo dilakukan secara serentak pada setiap tahap pembangunan infrastruktur. Adapun jenis pembangunan infrastruktur dan rincian anggaran dananya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun**  
**Anggaran 2015**

No	Uraian	Anggaran
1	Pembangunan Drainase Jalan Dan Saluran Irigasi Kwarter	Rp. 212,583,450
2	Pembangunan Bangket saluran irigasi kwarter	Rp. 110,745,000
3	Cor blok jalan	Rp. 203,860,000
4	Bangket Jalan	Rp. 251,848,000
5	Pembangunan Gapura	Rp. 28,814,000
6	Pembangunan Balai Dusun	Rp. 48,896,500
7	Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Rp. 137,442,050
8	Fasilitas Perbaikan Rumah layak huni (6 Paket)	Rp. 100,813,500
9	Pembersihan jaringan tersier ( angkat wallet )	Rp. 3,700,000
10	Pembangunan Tempat Sepeda	Rp. 42,665,000
	Jumlah	Rp. 1,141,367,500

*Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Gilangharjotahun 2015*

Tabel diatas menunjukkan jenis pembangunan dan anggaran dana untuk sebuah pembangunan. Jenis pembangunan infrastruktur dan anggaran dana tersebut tentunya tidak digunakan pada satu titik pembangunan saja, melainkan pada titik dan lokasi yang berbeda pada setiap wilayah Pedukuhan yang ada di Desa Gilangharjo. Kesamaan jenis pembangunan yang ada dikarenakan oleh fasilitas yang ada di wilayah tingkat Pedukuhan atau rukun tetangga kurang memadai dan bahkan tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur. Jenis

pembangunan ini tentunya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Gilangharjo.

## **B. Evaluasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015**

### **1. Asesmen Kebutuhan**

Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo sangat penting untuk dilakukan, mengingat Desa Gilangharjo merupakan wilayah yang dilintasi oleh jalan lintas Kabupaten dan jalan Kabupaten yang menjadi *icon* seseorang dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan sebuah Kabupaten. Desa Gilangharjo mempunyai wilayah dengan jenis wilayah yang berbeda-beda, dimulai dengan wilayah yang padat penduduk, hingga wilayah dengan penduduk yang sedikit. Hal ini tentunya mempengaruhi pembangunan yang ada di Desa Gilangharjo, wilayah dengan penduduk yang padat akan sangat cepat menentukan kebutuhan pembangunan diwilayahnya, sedangkan pada wilayah yang memiliki penduduk sedikit akan lebih lama menentukan kebutuhan pada wilayahnya.

Wilayah dengan penduduk yang padat akan cepat menentukan kebutuhan pembangunannya dikarenakan hampir seluruh wilayahnya digunakan untuk pemukiman penduduk, sehingga penduduk dapat memperhatikan bagaimana kondisi bangunan infrastruktur dan apa saja kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Wilayah dengan penduduk yang sedikit akan lebih lama menyusun kebutuhan pembangunan dikarenakan tidak semua wilayah terdapat satuan penduduk yang mengamati dan memperhatikan bangunan infrastruktur, sehingga mereka akan lebih lama dalam menentukan kebutuhan pembangunannya dengan melihat kondisi dan keadaan wilayahnya.

Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo dimulai dengan melihat kondisi dan keadaan wilayah masyarakat pada masing-masing RT dan Pedukuhan, yang nantinya kondisi serta keadaan wilayah itu menjadi penentu kebutuhan pembangunan apa yang akan dilakukan di setiap RT atau Pedukuhan. Kondisi dan keadaan wilayah yang ada pada masing-masing RT nantinya akan membentuk kebutuhan pembangunan pada setiap RT. Hal ini sangat diperlukan karena yang memahami dan memerlukan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

Garis koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa, Kepala Dukuh dan Kepala RT yang ada di Desa Gilangharjo membentuk suatu komunikasi yang baik antar pemerintah Desa dan masyarakat wilayah Desa Gilangharjo. Koordinasi yang baik akan menimbulkan komunikasi yang baik juga, sehingga dengan adanya koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dukuh dan Ketua RT maka kondisi serta keadaan masyarakat yang ada pada tahun 2015 dapat dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015. Pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi dan keadaan wilayah setempat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan wilayah tersebut.

Masyarakat Desa Gilangharjo merupakan perencana pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo, karena masyarakat yang menyusun rencana pembangunan di wilayah masing-masing. Rencana pembangunan infrastruktur yang disusun oleh tingkat RT lalu diberikan kepada tingkat Pedukuhan dan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Gilangharjo melakukan musyawarah untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan setelah ada pemberitahuan dari Pemerintah Desa melalui Kepala Dukuh dan Ketua RT. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya dilaksanakan pada pertemuan RT, sehingga dari musyawarah pada tingkat RT yang melibatkan seluruh masyarakat yang berada di lingkungan RT, maka akan membentuk suatu kebutuhan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, tentunya dengan mendasarkan dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing.

Ketua RT mempunyai tugas menyaring kebutuhan pembangunan di wilayahnya sendiri yang diperoleh melalui musyawarah bersama antar warga, lalu membuat daftar atau list kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendaarkan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing, sehingga pembangunan yang terlaksana tepat dengan sasaran masyarakat tersebut. Setelah daftar atau list pembangunan tersebut selesai, lalu Ketua RT memberikan hasilnya kepada Kepala Dukuh saat musyawarah bersama tingkat Pedukuhan, hal ini biasanya dilakukan setiap awal bulan diakhir tahun.

Musyawarah bersama tingkat Pedukuhan menghasilkan prioritas pembangunan di setiap Pedukuhan, dimana nantinya akan menghasilkan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo. Hal ini berarti pembangunan yang telah disusun oleh masyarakat pada tingkat paling bawah (RT) tidak dilakukan semua pada satu tahap pembangunan karena dana Desa diterima secara bertahap. Prioritas pembangunan yaitu pembangunan yang diutamakan, mengingat Desa Gilangharjo memiliki 91 RT yang semuanya membutuhkan pembangunan infrastruktur.

**Tabel 3.4**  
**Kondisi Wilayah dan Jenis Pembangunan Desa Gilangharjo Tahun 2015**

No	Pedukuhan	Keadaan Wilayah	Jenis Pembangunan
1	Pedukuhan Kauman	Tanah Datar, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman, Industri Usaha Kecil Menengah	1. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2	Pedukuhan Kadekrowo	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Cor Blok Jalan 2. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
3	Pedukuhan Karanggede	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Bangket Jalan

4	Pedukuhan Depok	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Cor Blok Jalan
5	Pedukuhan Tegalurung	Tanah Datar, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Pembangunan Gapura 2. Bangket Jalan
6	Pedukuhan Banjarwaru	Tanah Datar, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Cor Blok Jalan
7	Pedukuhan Krekah	Tanah Datar, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Drainase Jalan (Batu Putih) 2. Bangket Jalan 3. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
8	Pedukuhan Gunting	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Bangket Jalan 2. Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni
9	Pedukuhan Ngaran	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Bangket Jalan 2. Cor Blok
10	Pedukuhan Bongsren	Tanah Batu Kapur, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman	1. Rehabilitasi Drainase Imbangan Jalan Aspal 2. Cor Blok Halaman PAUD 3. Gedung Pertemuan
11	Pedukuhan Daleman	Tanah Datar, Perkebunan, Persawahan, Pemukiman, Industri Usaha Kecil Menengah	1. Bangket Jalan 2. Cor Blok Jalan
12	Pedukuhan Kadisoro	Tanah Datar, Persawahan, Pemukiman	1. Drainase Jalan Tertutup (Batu Putih)
13	Pedukuhan Jomboran	Tanah Datar, Perkebunan, Pemukiman	1. Drainase Jalan (Bata Merah)
14	Pedukuhan Jodog	Tanah Datar, Persawahan, Pemukiman	1. Pembangunan Gapura 2. Drainase Jalan (Bata Merah)
15	Pedukuhan Karangasem	Tanah Datar, Pemukiman, Industri Usaha Kecil Menengah	1. Cor Blok Jalan Lingkungan 2. Cor Blok Jalan 3. Pembangunan Balai Dusun

*Sumber: Profil Desa Gilangharjo dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015*



## 2. Evaluasi Proses Pembangunan

Evaluasi proses adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan. Faktor-faktor yang dinilai dalam evaluasi proses pembangunan didalam pembahasan penelitian ini antara lain: pelaksanaan pembangunan dan kinerja pelaksanaan pembangunan.

Proses pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Gilangharjo dilakukan langsung oleh masyarakat secara gotong-royong. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Pedesaan yang membangun wilayahnya secara gotong-royong. Masyarakat merupakan pelaksana utama dari pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara gotong-royong bahu membahu menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.

Masyarakat Desa Gilangharjo tidak semua menjadi pelaksana pembangunan, sebab masih ada pada beberapa Pedukuhan yang menggunakan jasa buruh bangunan dalam pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa. Masyarakat yang mengerjakan pembangunan infrastruktur dengan jasa buruh bangunan umumnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah keatas, masyarakat di Pedukuhan tersebut menggunakan jasa buruh bangunan untuk membangun pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan jasa buruh bangunan antara lain pada Pedukuhan Kadisoro, Jodog, Karangasem, dan Daleman, mengingat wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan dominasi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya.

Pembangunan yang sedang berjalan tentunya memiliki sebuah kinerja, kinerja yang dimaksud adalah kinerja seseorang dalam menyelesaikan sebuah pembangunan infrastruktur. Target pembangunan infrastruktur disusun pada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tingkat Rukun Tetangga ataupun Pedukuhan. Target pembangunan disusun sebagai acuan dasar proses pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung, dengan adanya target pembangunan maka masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Kinerja masyarakat Desa Gilangharjo dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dengan berbagai macam. Mulai dari masyarakat yang menetapkan target kinerja hariannya, dan masyarakat yang tidak menetapkan target kinerja hariannya. Target kinerja harian merupakan sebuah target atau capaian yang akan diselesaikan pada satu hari pelaksanaan pembangunan. Target kinerja harian berisi berapa volume bangunan yang akan diselesaikan pada satu hari, dengan ditetapkannya target harian ini maka masyarakat dapat memperkirakan berapa lama

proses pembangunan infrastruktur akan belangsung sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat sesuai atau ter-struktur.

Target kinerja harian yang tidak ditetapkan maka pembangunannya hanya sesuai dengan keadaan dan kondisi dari pekerja atau pelaksana pembangunan infrastruktur. Selain itu pembangunan yang tidak menetapkan kinerja hariannya berarti pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam memperkirakan penyelesaian sebuah pembangunan infrastruktur. Selain itu, jika tidak ada penetapan kinerja harian, maka biaya yang digunakan juga tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sebab jika pembangunannya menggunakan jasa buruh bangunan dan masyarakat setempat tidak menetapkan target kinerja harian, maka sudah dapat dipastikan biaya operasional untuk jasa buruh bangunan akan membesar.

### **3. Evaluasi Keluaran Pembangunan**

Evaluasi keluaran pembangunan adalah mengukur dan menilai keluaran dari sebuah pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana serta akibat atau pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana. Dalam pembahasan penelitian evaluasi keluaran pembangunan yang digunakan adalah dengan menilai hasil dari sebuah pembangunan, pengaruh serta akibat dari sebuah pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo yang telah terlaksana pada tahun 2015.

Kondisi atau keadaan masyarakat, kebutuhan pembangunan masyarakat, pelaksana pembangunan, dan kinerja sebuah pembangunan tentunya mempengaruhi hasil dari sebuah pembangunan infrastuktur. Hasil pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo merupakan capaian dari kebutuhan masyarakat Desa Gilangharjo, dimana masyarakat berperan dan terlibat dalam patisipasi pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat adalah penentu, pelaksana dan pengguna infrastuktur yang telah dilaksanakan.

Hasil sebuah pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Gilangharjo pada tahun 2015 sesuai dengan permintaan masyarakat sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat yang menyusun kebutuhan pembangunan dan menjadi pelaksana utama dalam sebuah pembangunan, tentunya dengan gotong-royong menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sendiri seperti yang dikatakan oleh Susanto selaku masyarakat Desa Gilangharjo yang merupakan perencana dan pelaksana pembangunan infrastruktur. Pembangunan Desa Gilangharjo pada setiap Pedukuhan memenuhi target yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan Desa Gilangharjo, sehingga hasil pembangunan infrastruktur dapat dikatakan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi antar Kepala Dukuh dan Ketua RT serta partisipasi masyarakat Desa Gilangharjo dalam pembangunan infrastruktur, baik itu dalam perencana pembangunan maupun pelaksana pembangunan. Ketika masyarakat Desa Gilangharjo disibukkan dengan pekerjaannya, maka

masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat yang mempunyai waktu luang dalam kesehariannya dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing.

### **C. Kendala Pembangunan Infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015**

Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Gilangharjo tahun 2015 tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur terdiri dari beberapa macam. Adapun faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur tahun 2015 menurut Siswantara antara lain:

1. Perbedaan kelas ekonomi masyarakat yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Basuki dalam wawancara 25 Oktober 2016 menuturkan bahwa kelas ekonomi yang ada di Desa Gilangharjo terbagi atas tiga kelas, kelas ekonomi menengah ke atas, kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas cenderung rendah dalam berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah cukup berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah sangat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur.

Partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat mempengaruhi dan bahkan menghambat pembangunan infrastruktur. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sedangkan pelaksana pada sebuah pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang akan bekerja baik itu dengan gotong royong dibantu tenaga pokok, maupun pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong secara penuh oleh masyarakat setempat. Pembangunan yang tidak ada partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi, keadaan atau kebutuhan pada masyarakat tersebut, sehingga manfaat dari sebuah pembangunan infrastruktur tidak dirasakan secara maksimal.

2. Kinerja buruh bangunan

Pemerintah Desa Gilangharjo memberikan kewenangan kepada masyarakat tingkat Pedukuhan dan RT dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa memberikan anggaran untuk jasa buruh bangunan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dengan memperhatikan swadaya dan swakarsa yang dimiliki oleh masyarakat. Mengingat masyarakat Desa Gilangharjo mempunyai tanggungjawab didalam mata pencahariannya masing-masing, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara setiap hari diberi anggaran untuk jasa buruh bangunan,

tetapi penganggaran pembangunan diserahkan kembali kepada masyarakat, apakah semua pekerja pembangunan infrastruktur menggunakan jasa buruh bangunan, atau menggunakan partisipasi masyarakat secara gotong-royong.

Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong atau menggunakan jasa buruh bangunan mempunyai kinerja yang berbeda. Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong oleh masyarakat setempat akan menetapkan target dari sebuah pembangunan, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, hal ini dilakukan agar dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dapat efektif dan efisien. Sedangkan pada pelaksana pembangunan dengan jasa buruh bangunan, kinerja pelaksanaannya tidak menetapkan target, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, sebab yang mereka ketahui hanyalah bekerja menyelesaikan sebuah pembangunan, dan tidak memperhatikan anggaran dana yang digunakan dalam sebuah pembangunan infrastruktur.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Evaluasi pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015 dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong.  
Pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong dilakukan secara bersamaan karena masyarakat Desa Gilangharjo menerapkan nilai-nilai masyarakat pedesaan.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015 menggunakan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat.  
Pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat maka pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat.
3. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal.  
Dana Desa digunakan untuk pemerataan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana Desa Gilangharjo yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yang berjumlah Rp.1,685,203,000,- dan sebesar 70% (Rp.1.179.642.000,-) digunakan untuk pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur dapat terserap sebesar Rp. 1,141,367,500,-.

4. Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo berdasarkan kebutuhan masyarakat.  
Kebutuhan pembangunan Desa Gilangharjo berdasarkan keadaan dan kondisi wilayah masyarakat setempat. Sehingga dengan memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat dapat dilihat kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dukuh dan Ketua RT menjadi kunci dalam sebuah perumusan kebutuhan dan prioritas pembangunan ditingkat RT atau Pedukuhan.
5. Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.  
Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo adalah masyarakat Gilangharjo sendiri dengan partisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur secara gotong royong, namun pada wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas menggunakan jasa buruh bangunan agar pembangunan infrastruktur dapat tetap berlangsung.
6. Hasil dari pembangunan Desa Gilangharjo sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 sesuai dengan keinginan masyarakat karena masyarakat sebagai perencana dan pelaksana proses pembangunan infrastruktur.
7. Kendala dalam pembangunan infrastruktur.  
Kendala pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas yang enggan melakukan pembangunan infrastruktur.

## **B. Saran**

Saran untuk Pemerintah Desa Gilangharjo dan masyarakat Desa Gilangharjo sebagai pelaksana pembangunan yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo yang belum terlaksana pada tahun 2015 sebaiknya dilakukan pada tahun selanjutnya, agar pembangunan infrastruktur dapat berkesinambungan.
2. Pemerintah Desa Gilangharjo harus dapat menyiasati pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo pada wilayah dengan ekonomi kelas menengah keatas yang tidak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.
3. Kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo seperti kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebaiknya lebih diminimalisir. Mengingat kesibukan masyarakat Desa Gilangharjo maka pembangunan dapat dilaksanakan secara mingguan dan secara kelompok.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Bachtiar, Ef. (2002). *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Beratha, Nyoman. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johara, T. Jayanta dan Pramandika. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mubyarto. (1996). *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poernomo, Mangku. (2004). *Pembaruan Desa "Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa"*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Safi'I. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press.
- Salim, Agus. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofyan. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetrisno. (1985). *Dasar-Dasar Evaluasi & Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subakti, Ramlan. (2001). *Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta
- Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibawa, S, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wirawan. (2012). *Evaluasi "Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi"*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa <http://lkbh.uny.ac.id> diakses 20 September 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jurnal:

\_\_\_\_\_, (2010). Prakarsa Compendium "Kumpulan Artikel Pilihan dari Jurnal Pakarsa Infrastruktur Indonesia".

Henry, Stepanus. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.2, 612-625.

Jamal, Erizal. (2009). Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol.28, No. 1, 7-14.

Monica, Euodia. (2013). Investasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.1, No.2, 489-498.

Nurharjadmo, Wahyu. (2008). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan. *Spirit Publik*, Vol.4, No.2, 215-228.

Qomari, Rohmad. (2008). Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, 1-15.

Rohman, Nanang. (2010). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol.02, No.01, 30-36.